LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

TRIWULAN 2 TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN 2

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

> Disahkan di Makassar Pada hari Selasa, 1 Juli 2025

> > KETUA TIM SURVEI

DWI PURWADI, S.H., M.H. NIP. 19610423 198603 1 003

Mengetahui:

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

<u>Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19581005 198403 1 001

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Makassar yang diambil dengan kuesioner secara daring dan dapat diakses di mana saja menggunakan aplikasi SISUPER yang disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

Makassar, 1 Juli 2025

Ketua Tim Survei,

DWI PURWADI, S.H., M.H.NIP. 19610423 198603 1 003

DAFTAR ISI

BAE	3 I PENDAHULUAN 1
1.1.	Latar Belakang1
1.2.	Maksud Dan Tujuan2
1.3.	Landasan Hukum
1.4.	Rencana Kerja
BAE	B II METODOLOGI4
2.1.	Metode Penelitian4
2.2.	Populasi Dan Sampel4
2.3.	Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis5
2.4.	Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control5
2.5.	Teknik Analisis Data5
2.6.	Tahapan pelaksanaan6
BAE	B III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI8
3.1.	Profil responden8
3.2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator12
3.3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar14
BAE	3 IV PENUTUP
4.1.	Kesimpulan
4.2.	Rekomendasi
4.3.	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan27
LAN	IPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Tabel Halar	nan
1.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	7
2.	Nilai Persepsi	7
3.	Responden Berdasarkan Umur / Usia	8
4.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	9
5.	Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	10
6.	Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	11
7.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	14
8.	Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	15
9.	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada Survei Triwulan 2/2025	18
10.	Rencana Tidak Lanjut Perbaikan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Makassar merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjadi satuan kerja menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
 - Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi SISUPER
 - b. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden melalui link aplikasi SISUPER.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Morgan and Krejcie, yaitu jumlah sampel responden ditentukan dari jumlah populasi survei harian selama 3 bulan terakhir. Lalu sampel responden diarahkan untuk mengakses kuesioner digital melalui website Pengadilan Tinggi Makassar yang terkoneksi ke aplikasi SISUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Link aplikasi SISUPER diberikan kepada daftar pelanggan (pengguna) tetap layanan Pengadilan, dan juga kepada pencari keadilan yang menggunakan layanan pengadilan dalam waktu tertentu. Berikut *Customer Base* (daftar layanan) Pengadilan Tinggi Makassar :

No.	Jenis Layanan		
	KEPANITERAAN		
	1. Pengaduan		
Α	2. Pemberian Informasi		
	3. Permohonan Banding		
	4. Pembinaan dan Pengawasan		

	5. Ijin Penelitian				
	6. Advokat/Permohanan Sumpah				
7.Perpanjangan Penahanan					
	KESEKRETARIATAN				
В	1. Pengaduan				
В	2. Permohonan Informasi				
	3. Pembinaan dan Pengawasan				

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Makassar.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara daring. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data diunggah oleh petugas pelaksana dari aplikasi SISUPER.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan

skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot ratarata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup			
1	Manipulasi Peraturan			
2	Penyalahgunaan Jabatan			
3	Menjual Pengaruh			
4	Transaksi Biaya			
5	Biaya Tambahan			
6	Hadiah			
7	Transparansi Biaya			
8	Percaloan			
9	Perbuatan Curang			
10	Transaksi Rahasia			

Tabel 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. **Umur / Usia**

Responden menurut karakteristik umur/usia, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Responden Berdasarkan Umur/ Usia

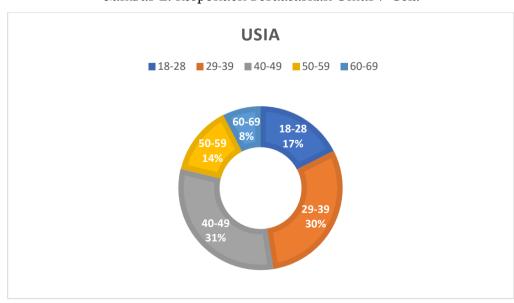
No	Umur / Usia	Frekuensi	%
1	18-28	14	17,50
2	29~39	24	30,00
3	40~49	25	31,25
4	50~59	11	13,75
5	60~69	6	7,50
Jumlah		80	100

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total 80 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan rentan usia 40-49 tahun sebanyak 25 orang (31,25%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan rentan usia 60-69 sebanyak 6 orang (7,50%).

Karakteristik Rentan usia/umur dari 80 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2. Responden Berdasarkan Umur / Usia



Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

3.1.2. Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

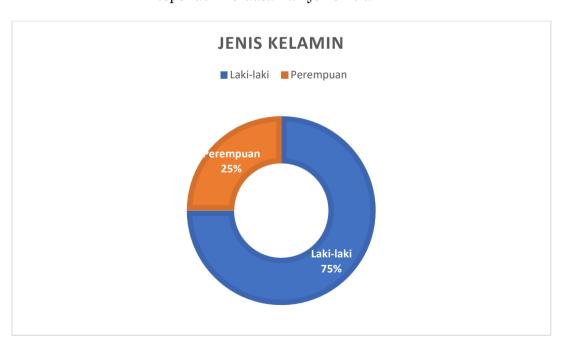
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki ~ laki	60	75
2	Perempuan	20	25
Jumlah		80	100

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin di atas bahwa dari total 80 responden, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang (75,00%) dan perempuan sebanyak 20 orang (25,00%).

Karakteristik Jenis kelamin dari 80 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

3.1.3. Pendidikan Terakhir

Responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5 Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	1	1,25
5	D1	0	0
6	D2	3	3,75
7	D3	0	0
8	S1 / D4	52	65,00
9	S2	22	27,50
10	\$3	2	2,50
	Jumlah	80	100

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari keseluruhan responden pada survei ini, adalah responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1/D4) sebanyak 52 orang (65,00%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan Pendidikan Terakhir SMA sebanyak 1 orang (1,25%).

Karakteristik Pendidikan Terakhir dari 80 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir ■ SMA ■ D2 = S1/D4 **S2 S**3

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

3.1.4. Pekerjaan Utama

Responden menurut karakteristik latar belakang pekerjaan, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6 Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN / PNS	7	8,75
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	Swasta	8	10,00
5	Wirausaha	1	1,25
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Masyarakat Lainnya selaku Pencari	64	80,00
	Keadilan		
	Jumlah	80	100

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama di atas bahwa dari total 80 responden, mayoritas responden pada survei ini berprofesi Masyarakat Lainnya selaku Pencari Keadilan yakni sebanyak 64 orang (80,00%), dan kategori responden paling sedikit adalah Wirausaha yakni sebanyak 1 orang (1,25%).

Karakteristik Pekerjaan Utama dari 80 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 5 Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama



Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. <u>Indikator Manipulasi Peraturan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval index 3,900.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,850.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,875.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,738.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Transaksi Biaya di luar dari yang telah ditetapkan secara resmi.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,550.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari korupsi melalui Biaya Tambahan.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,575.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari pemberian/menjanjikan hadiah.

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,763.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari ketidaktransparansi biaya.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,913.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari praktik percaloan.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,838.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari tindakan perbuatan curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,888.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bebas dari transaksi rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar sebesar **3,79** atau **94,72**%.

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dimaksud seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 7.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Makassar

No	Unsur Pertanyaan	NRR		
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,900		
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,850		
Q 3	Menjual Pengaruh	3,875		
Q 4	Transaksi Biaya	3,738		
Q 5	Biaya Tambahan	3,550		
Q 6	Hadiah	3,575		
Q 7	Tranparansi Biaya	3,763		
Q 8	Percaloan	3,913		
Q 9	Perbuatan Curang	3,838		
Q 10	Transaksi Rahasia	3,888		
	JUMLAH			
	NILAI RATA-RATA IPK 3,75			

Keterangan:

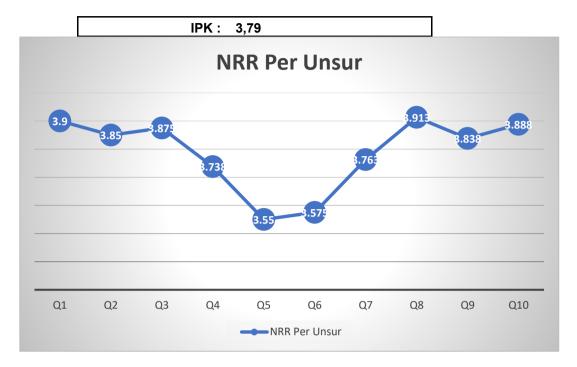
Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Anti Korupsi

*) NRR Per Unsur : Jumlah NRR IPK Tertimbang

: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi



Gambar 6. Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Makassar

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 8.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi | 15

3.4. Kesan & Pesan Responden

	Kesan & Pesan
1	Pertahankan
2	Alhamdulillah Susai dengan pelayanan profesional dan akuntabel
3	Seluruh Kegiatan Peradilan sudah cukup memberikan kepuasan & kenyamanan.
4	Tetap dalam menjaga wibawa Pegawai Pengadilan
5	Pelayanannya bagus dan sesuai prosedur serta tidak terjadi penyimpangan apapun
6	Sukses selalu buat pengadilan di Indonesia
7	Pelayanan agar dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.
8	, , ,
9	Terimakasih atas pelayanannya dan tetap teruslah menjaga integritas
	Pengadilan Tinggi Makassar Luar Biasa
10	Pengadilan Tinggi Makassar Sangat Luar Biasa
11	Pelayanan di Pengadilan sudah sangat baik, dan semoga terus ditingkatkan
12	Profesional dan sesuai prosedur
13	Pelayanan ptsp sesuai prosedur yang ads
14	Petugas ptsp sudah sesuai prosedur yang ada
15	Pelayanan baik, ramah
16	Pelayanan memuaskan, ramah, memudahkan
17	Pelayanan baik, ramah, dan petunjuk untuk layanan selalu jelas dari penjaga dan petugas PTSP
18	Cukup bagus
19	Mohon dibantu excourt saya belum aktif
20	SALUT DAN BANGGA ATAS ADANYA APLIKASI E-COURT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PERADILAN
21	-
22	-
23	Terimakasih
24	terimakasih telah memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan.
25	terimakasih telah memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.
26	Semoga pelayanannya tetap cepat dan mudah. Terimakasih
27	Professional, berintegritas, kerja prima
28	Profesional, berintegritas, melayani dengan prima
29	Terimaksih atas pelayanan yang lebih cepat dan mudah.
30	Pelayanannya yang cepat dan mudah. Terimakasih
31	Semoga pelayanan yang diberikan akan terus dan selamanya memberikan kemudahan.
32	Menjaga anti korupsi
33	Semoga pelayanan pengadilan cepat dan tepat
34	Semoga dipertahankan selalu kinerjanya
35	Pertahankan kinerja yang ada
36	Karena baru pertama kali dan pelayanannya sudah sangat baik sekalisemua petugasnya ramah dan gerak cepat
37	semoga bisa lebih ditingkatkn pelayanannya
38	Tolong pelayanan lebih ditingkatkan, terima kasih atas layanannya.
39	Terimakasih atas pelayanan yang ramah
40	Terimakasih atas pelayanan yang ramah
41	Kami pencari keadilan berharap agar keadilan ditegakkan sesuai prosedur hukum yang berlaku agar
	kepastian hukum bisa tercapai
42	Good Government
43	Pelayanan petugas sangat baik

44	Pelayanan petugas sangat baik
45	Pelayanan dalam pengadilan selalu bagus
46	Sangat memuaskan
47	TERIMA KASIH
48	PT Makassar telah melayani dengan baik
49	PT Makassar telah memberikan informasi dan pelayanan yang baik
50	Profesionalitas pelayanan mesti makin di perbaiki dan ditingkatkan utk peradilan yg memberi
30	pelayanan prima
51	Maju terus PT Mks
52	Pertahankan pelayanan dan komitmen atas kualitas
53	Terima kasih sehat selalu
54	Terima kasih atas pelayanannya ????????
55	Terima kasih atas pelayanannya yang memuaskan ????????
56	Pelayan pengadilan sangat baik selama saya urus perkara di pengadilan
57	Layanan yang diberikan sangat baik
58	Pelayanan baik
59	sangat ramah dan baik sekali pelayanannya
60	sangat puas dengan pelayanannya.
61	Pelayanan yang sangat profesional dan transparan
62	Pelayan yang di berikan kepada saya khususnya sangat baik
63	Semoga makin maju
64	Tingkatkan displin pelayanan.
65	Terima
66	Terima kasih Atas pelayanan bapak ibu
67	Sangat baik dan memuaskan
68	Sanfat memuaskan
69	Selalu memberikan pelayanan yg cepat dan Fast respon
70	Pelayanan Baik
71	Kesana pelayanan yang memuaskan dari pengadilan dan semoga terus memberikan pelayanan
72	terbaik
72 73	0
74	di tingkatkan kualitas pelayanan
75	pelayanan memuaskan
76	pelayanan nya sesuai prosedur
77	0
78	
79	Kesan dan pesan sy bahwa di pengadilan lumayan baik
80	Pelayanan yang diberikan cukup baik, mohon agar dipertahankan atau ditingkatkan lagi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,79 atau 94,72% masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 9 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada survei Triwulan 2 Tahun 2025

No	Unsur Penilaian	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang	Pering kat	Nilai IPK	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,900	0,390	2		
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,850	0,385	5		
3	Menjual Pengaruh	3,875	0,388	4		
4	Transaksi Biaya	3,738	0,374	8		Α
5	Biaya Tambahan	3,550	0,355	10		
6	Hadiah	3,575	0,358	9		(Bersih
7	Transparansi Biaya	3,763	0,376	7		dari
8	Percaloan	3,913	0,391	1		Korupsi)
9	Perbuatan Curang	3,838	0,384	6		
10	Transaksi Rahasia	3,888	0.389	3		
Jumlah		37,888	3,789		94,72	

Dari tabel 9 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor terendah, yaitu :

1. Biaya Tambahan (peringkat ke-10)

Bentuk Pertanyaan : Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?

2. Hadiah (peringkat ke-9)

Bentuk Pertanyaan : Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

3. Transaksi Biaya (peringkat ke-8)

Bentuk Pertanyaan : Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Dari tabel 9 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor tertinggi, yaitu:

- 1. Percaloan (peringkat ke-1)
 - Bentuk Pertanyaan: Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 2. Manipulasi Peraturan (peringkat ke-2) Bentuk Pertanyaan : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 3. Transaksi Rahasia (peringkat ke-3) Bentuk Pertanyaan: Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Untuk selengkapnya tabulasi perhitungan survei terdapat dalam lampiran 2.

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK) PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TRIWULAN 2 TAHUN 2025

NILAI IPK

3,79 / 94,72%

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN RESPONDEN JUMLAH : 80 Orang PEKERJAAN: 7 Orang PNS 0 Orang TNI 0 Orang POLRI 8 Orang Swasta Wirausaha 1 Orang Tenaga Kontrak = 0 Orang

Lainnya

Periode Survei yaitu bulan April 2025 sampai dengan bulan

= 64 Orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Juni 2025.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,260 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah di antara indikator lainnya yaitu 3,550 dan tergolong dalam indikator kinerja bersih dari korupsi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator Hasil Analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan kami prioritaskan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dengan jangka pendek kurang dari 3 bulan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 10 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan Waki	Penanggung- tu jawab
1.	Biaya	Mengupdate informasi Setiap	bulan Hakim Tinggi
	Tambahan	pada seluruh media dimonitoria	ng Pengawas PTSP
		informasi yang dimiliki secara berk	tala. dan Hakim Tinggi
		PT Makassar.	Koordinator Tim
			Survei.
2.	Hadiah	• Tetap memutar Audio Setiap har	ri kerja, Hakim Tinggi
		Public Campaign di diputar se	etiap 2 Pengawas PTSP
		lingkungan Pengadilan jam.	dan Hakim Tinggi
		Tinggi Makassar.	Koordinator Tim
			Survei.
3.	Transaksi	• Tetap memutar Audio Setiap har	ri kerja, Hakim Tinggi
	Biaya	Public Campaign di diputar se	etiap 2 Pengawas PTSP
		lingkungan Pengadilan jam.	dan Hakim Tinggi
		Tinggi Makassar.	Koordinator Tim
			Survei.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Kuesioner.
- 2. Data Responden.

Lampiran 1 : Kuesioner

Dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi Makassar esurvey.pt-makassar.go.id

Lampiran 2 : Data Responden

PENGELOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN: UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Data Responden Yang Diunduh dari Aplikasi SISUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI:

	Domisili	Umur / Jenis Kelamin	Pendidikan / Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	SULAWESI	61 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SULAWESI	35 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	SUMATERA	52 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	SULAWESI	38 Tahun											
	BARAT	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	2	2	1	4	1	4	4	4
5	SULAWESI	60 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4
6	SULAWESI	40 Tahun											
0	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
7	SULAWESI	61 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
8	SULAWESI	40 Tahun											
0	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	SULAWESI	54 Tahun											
9	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
10	SULAWESI	54 Tahun											
10	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
11	SULAWESI	32 Tahun											
111	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	SULAWESI	45 Tahun											
12	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	1	1	2	3	4	4	4
13	SULAWESI	50 Tahun											
13	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	SULAWESI	50 Tahun											
14	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 -	SULAWESI	31 Tahun											
15	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	SULAWESI	31 Tahun											
Τρ	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	SULAWESI	31 Tahun											
1/	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SULAWESI 28 Tahun					
1 40 1	1				
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 35 Tahun					
BARAT Laki-laki S2WIRAUSAHA 3 4 4 2 3	4	4	3	3	4
SULAWESI 44 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 25 Tahun					
SELATAN Perempuan S1SWASTA 3 4 4 4 4	4	4	4	3	4
SULAWESI 25 Tahun					
SELATAN Perempuan S1SWASTA 4 4 4 4 4	4	4	3	3	4
SULAWESI 32 Tahun					
SELATAN Laki-laki S2LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
26 SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 29 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 29 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
30 SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
31 SULAWESI 49 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
32 SULAWESI 42 Tahun					
SELATAN Perempuan S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
33 SULAWESI 39 Tahun					
SELATAN Laki-laki SZLAINNYA Z 3 4 3 4	4	3	4	4	4
34 SULAWESI 64 Tahun					
SELATAN Perempuan S1PNS 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
35 SULAWESI 64 Tahun					
SELATAN Perempuan S1PNS 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
36 SULAWESI 45 Tahun					
SELATAN Perempuan S1SWASTA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
37 SULAWESI 35 Tahun					
SELATAN Perempuan S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
38 SULAWESI 63 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
39 SULAWESI 50 Tahun					
SELATAN Laki-laki S2PNS 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
40 SULAWESI 50 Tahun					
SELATAN Laki-laki S2PNS 4 4 4 4 4	4	4	4	4	4
SULAWESI 47 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 1	1	4	4	4	4
SULAWESI 40 Tahun					
SELATAN Laki-laki S1LAINNYA 4 4 4 4 4	4	4	3	3	4
43 SULAWESI 41 Tahun Diploma					
SELATAN Perempuan 2LAINNYA 4 1 4 4 1	1	4	4	4	4
44 SULAWESI 41 Tahun Diploma				[
SELATAN Perempuan 2LAINNYA 4 1 4 4 1	1	4	4	4	4

		1		1	ı		ı					1	
45	SULAWESI SELATAN	41 Tahun	Diploma	4	1	4	4	1	4	1	4	4	4
		Perempuan	2LAINNYA	4	1	4	4	1	4	1	4	4	4
46	SULAWESI SELATAN	31 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	41 Tahun		-			-	-					-
47	SELATAN	Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	3	1	1	1	1	4	4	4
	SULAWESI	46 Tahun	011100111101111		•		_				Ė	Ė	•
48	SELATAN	Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
	SULAWESI	46 Tahun	321 113	•	•	'	'	_	'	'	•	•	•
49	SELATAN	Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
	SULAWESI	51 Tahun	02.113		•	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	•
50	SELATAN	Laki-laki	S3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	48 Tahun		-		•		•	•		-	-	•
51	SELATAN	Laki-laki	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	51 Tahun			-		-			-			-
52	SELATAN	Laki-laki	S2SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	31 Tahun											
53	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	41 Tahun											
54	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	41 Tahun											
55	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	27 Tahun											
56	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	3	3	3	4	1	4	3	3
	SULAWESI	27 Tahun											
57	SELATAN	Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	SULAWESI	38 Tahun											
56	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4
59		32 Tahun											
39	DKI JAKARTA	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	SULAWESI	31 Tahun											
00	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	SULAWESI	33 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	SULAWESI	47 Tahun											
	SELATAN	Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
63	SULAWESI	31 Tahun			_					_			
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	SULAWESI	32 Tahun		_							_	_	
	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	SULAWESI	30 Tahun	644.444.444										_
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	1	3	3	1	4	4	4	1
66	SULAWESI	30 Tahun	641.418181974									_	
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1
67	SULAWESI	31 Tahun	COL AININIVA					_					
	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	SULAWESI	54 Tahun	CALAININ/A	4	4	4	4	4	4	4	А	А	4
	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	SULAWESI	26 Tahun	CALAIAINA	1		Л	1	Л	Л	A	Л	Л	4
	SELATAN	Perempuan 26 Tahun	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	SULAWESI BARAT	26 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SULAWESI	39 Tahun	STLAIMINIA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	BARAT	Laki-laki	C11 AININIVA	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1
	DAKAI	LaKI-IdKI	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4

72	SULAWESI	26 Tahun											
12	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4
73	SULAWESI	25 Tahun											
/3	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	3	3	4	4	4	2	2	4	3	2
74	SULAWESI	26 Tahun											
74	SELATAN	Laki-laki	S2LAINNYA	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4
75	SULAWESI	25 Tahun											
/5	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	SULAWESI	25 Tahun											
70	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
77	SULAWESI	25 Tahun											
//	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	SULAWESI	25 Tahun											
70	SELATAN	Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	SULAWESI	52 Tahun											
79	SELATAN	Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
80	SULAWESI	48 Tahun											
80	SELATAN	Laki-laki	S2SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4